

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Desa/Kelurahan. Perpustakaan kelurahan merupakan bentuk perpustakaan umum yang terdapat di tingkat kelurahan. Sasaran pemakainya adalah warga kelurahan tersebut. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, tepatnya pada pasal 22 ayat 1 yang berbunyi “Perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.”

Di lingkungan wilayah Jakarta Selatan terdapat 65 kelurahan dan 10 kecamatan yang sampai saat ini belum seluruhnya terdapat perpustakaan. Hal ini karena terkendala belum memadainya pengelolaan perpustakaan di kelurahan. Padahal, tujuan perpustakaan kelurahan akan tercapai apabila tiga faktor berikut berjalan dengan baik, yaitu pemakai, pengelola/pustakawan, dan fisik perpustakaan (Baderi, 1996). Lebih lanjut, petugas kelurahan ini diharuskan menyediakan tempat khusus untuk menyimpan buku. Tempat khusus itu berupa ruangan buku. Petugas kelurahan juga diberi alternatif lain dalam pengelolaan perpustakaan, misalnya menyerahkan ke Karang Taruna, PKK atau taman bacaan masyarakat (TBM) yang saat ini sudah ada.

Keberlangsungan perpustakaan kelurahan yang sudah beberapa lama berjalan sepertinya tidak terlalu menjadikannya populer di kalangan masyarakat. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan perpustakaan kelurahan, padahal peranannya dalam meningkatkan budaya baca masyarakat sangatlah penting. Hal ini terlihat dari hasil penelitian sebelumnya mengenai perpustakaan kelurahan yang berjudul ‘Pemanfaatan Layanan Perpustakaan Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat oleh Masyarakat Setempat’ oleh Rosinta Paulina Hutauruk dan ‘Pemanfaatan Layanan Perpustakaan Kelurahan: studi kasus di tiga kelurahan di Jakarta Timur’ oleh Nita Ismayati. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa walaupun tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan tujuan perpustakaan sudah baik, namun karena tingkat pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat masih belum terpenuhi, maka tingkat pemanfaatan layanan dan kunjungan ke perpustakaan kelurahan masih kurang sehingga perpustakaan kelurahan belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat (Hutauruk, 1991).

Menurut Harkrisyati Kamil (2003), keberadaan perpustakaan umum di Indonesia (dalam hal ini perpustakaan kelurahan) jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, masih mengecewakan. Pelayanan perpustakaan yang tidak maksimal, kurangnya program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, serta fungsi perpustakaan yang belum maksimal menjadi beberapa faktor yang menyebabkan perpustakaan di Indonesia tertinggal jauh dengan negara berkembang lainnya. Keadaan tersebut ditambah oleh keputusan pemerintah yang memberikan prioritas kepada sektor politik dan ekonomi dibandingkan dengan pengembangan perpustakaan. Selain kurangnya perhatian dari pemerintah, terdapat beberapa faktor lain di perpustakaan seperti faktor dana dan kurangnya tenaga ahli. Sementara itu ada anggapan bahwa rendahnya kebiasaan membaca merupakan beberapa contoh dari lambatnya perkembangan perpustakaan di Indonesia. Budaya membaca masih rendah, karena buku dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Masyarakat secara umum tidak terbiasa memiliki anggaran khusus untuk membeli buku, jurnal atau terbitan berkala, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah (Puspitasari, 2006). Faktor lainnya adalah perbedaan kualitas jasa dan layanan yang diberikan oleh beberapa perpustakaan umum. Perpustakaan umum yang berkualitas hanya dapat dijumpai pada kota-kota besar.

Oleh karena itu, harus ada gerakan yang menyeluruh serta melibatkan unsur lapisan masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan kelurahan yang belakangan ini keberadaannya kurang dilirik oleh pemerintah maupun masyarakat. Padahal dalam Keputusan Gubernur Propinsi Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpustakaan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemerintah dalam hal ini lurah setempat harus turut mendukung penyelenggaraan perpustakaan kelurahan di wilayahnya.

Perpustakaan kelurahan yang terdaftar di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta Selatan (KPADJS) sebagai perpustakaan kelurahan yang masih aktif pun ternyata tidak demikian halnya dengan kenyataan di lapangan. Banyak di antara perpustakaan kelurahan tersebut yang sebenarnya sudah kurang dinamis lagi atau dapat dikatakan mati suri. Kalau pun memang masih beroperasi, hal ini tidak ditunjang dengan adanya pengunjung yang turut menghidupkan perpustakaan. Perpustakaan kelurahan jadi identik dengan perpustakaan yang sepi, sempit, kotor, tidak lengkap koleksinya, tidak nyaman, dan persepsi negatif lainnya.

Pengelolaan perpustakaan kelurahan sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan perpustakaan umum karena perpustakaan kelurahan memang merupakan bagian dari perpustakaan umum, bahkan pembinaan perpustakaan kelurahan ini berada di bawah tanggung jawab Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Khusus Ibukota Jakarta (BPADKI). Hanya saja bedanya, perpustakaan kelurahan melayani kebutuhan informasi masyarakat dengan lingkup yang lebih sempit yaitu di tingkat kelurahan. Maka pengelolaan perpustakaan kelurahan pun diserahkan ke masing-masing kelurahan.

Kenyataan seperti ini membuat beberapa pihak menjadi prihatin karena di awal pendiriannya sebenarnya banyak yang menaruh harapan besar terhadap perpustakaan kelurahan agar dapat menjadi sarana belajar yang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari peresmian yang cukup meriah. Di lain pihak, sambutan dari masyarakat pun cukup lumayan. Namun, pada perjalanannya, perkembangan perpustakaan kelurahan bukan semakin meningkat, namun justru terlihat semakin menurun dan cenderung ditinggalkan oleh masyarakat. Tidak heran jika pada akhirnya banyak yang menjadi apatis dan berharap perpustakaan kelurahan ditiadakan saja. Banyak pula yang bertanya-tanya mengenai kondisi perpustakaan kelurahan saat ini dan bagaimana kelanjutannya. Inilah yang menggelitik penulis untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai keberlangsungan perpustakaan kelurahan tersebut. Apalagi melihat minimnya penelitian yang mengangkat topik serupa, maka penelitian ini dirasa cukup penting untuk dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, perpustakaan kelurahan yang dijadikan tempat penelitian adalah perpustakaan kelurahan Tegal Parang (TP) yang berlokasi di kecamatan Mampang Prapatan. Perpustakaan kelurahan ini dipilih karena dinilai memiliki kelebihan daripada perpustakaan kelurahan-perpustakaan kelurahan lainnya. Perpustakaan kelurahan TP dapat mempertahankan keberadaannya semenjak tahun 1993 hingga saat penelitian ini berlangsung sehingga pengelolanya dapat dikatakan paling memahami permasalahan perpustakaan kelurahan daripada pengelola perpustakaan kelurahan lainnya. Selain itu, perpustakaan ini juga telah beberapa kali memenangkan lomba perpustakaan kelurahan dan dijadikan sebagai perpustakaan percontohan untuk tingkat perpustakaan kelurahan. Namun, perkembangannya tidak berjalan lancar. Kenyataan inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti keberlangsungan perpustakaan kelurahan karena ternyata di balik kecilnya cakupan dan ukurannya, ternyata perpustakaan kelurahan menyimpan beragam permasalahan yang menunggu untuk dicarikan jalan keluarnya.

1.2 Permasalahan

Perpustakaan kelurahan sekarang ini belum memperoleh perhatian yang memadai baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Ada beberapa perpustakaan kelurahan yang dapat bertahan dan tetap berusaha mendayagunakan koleksi perpustakaanannya bagi masyarakat, namun ternyata banyak juga yang tidak dapat bertahan bahkan tutup atau dapat dikatakan mati suri karena kondisinya seperti antara ada dan tiada. Dari delapan belas perpustakaan kelurahan di Jakarta Selatan yang tercatat di data yang dimiliki oleh KPADJS, ternyata ada beberapa yang sudah tidak jelas kondisinya. Ada yang masih tetap beroperasi dan dikunjungi oleh masyarakat, ada yang sudah tidak diberdayakan lagi, ada yang berada di antara keduanya yaitu masih buka, namun sudah jarang dikunjungi masyarakat.

Berangkat dari kenyataan ini, penulis ingin menyoroti bagaimana kegiatan penyelenggaraan perpustakaan kelurahan yang meliputi aspek pemerintah yang dalam hal ini adalah lurah dan lembaga kelurahan, aspek KPADJS sebagai pembina perpustakaan kelurahan, aspek sumber daya manusia (SDM) yang dalam

hal ini adalah pengelola perpustakaan kelurahan, aspek sarana dan prasarana perpustakaan kelurahan, serta aspek penggunaannya.

Sebagai penelitian awalan mengenai keberlangsungan perpustakaan kelurahan, maka penelitian ini akan lebih menguraikan masalah-masalah yang ada pada masing-masing aspek. Tentunya dengan memperhatikan usaha-usaha atau program-program pemberdayaan perpustakaan yang dilakukan oleh perpustakaan kelurahan yang diteliti yaitu Perpustakaan kelurahan TP. Upaya yang dimaksud di sini adalah upaya yang menyebabkan perpustakaan tersebut dapat tetap bertahan di antara banyaknya perpustakaan kelurahan lain yang berguguran. Dengan tidak hanya menguraikan permasalahan dan turut menguraikan upaya pemberdayaan perpustakaan diharapkan dapat membawa manfaat bagi keberlangsungan perpustakaan kelurahan ke depannya dan bukan hanya melihat ke belakang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Memahami permasalahan yang dihadapi oleh Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang sehingga sulit berkembang bahkan cenderung mati suri dilihat dari aspek-aspek yang telah disebutkan.
2. Mencari tahu solusi-solusi yang kiranya dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut sehingga dapat diketahui potensi keberlangsungan Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang.
3. Mengetahui potensi keberlangsungan Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang ke depannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Manfaat bagi perkembangan ilmu
Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan umum,

terutama perpustakaan kelurahan sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan kepada pengelola perpustakaan kelurahan dan lurah TP dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan kelurahan di tengah masyarakat.
- b. Memberikan gambaran bagi perpustakaan kelurahan lainnya dalam rangka pengembangan perpustakaan kelurahan masing-masing.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, obyek, proses, dan manusia (Sulistyo-Basuki, 2006).

Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Studi kasus menghasilkan penelitian yang bersifat khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas (*bounded context*) sehingga tidak dapat dibuat generalisasi (Sulistyo Basuki, 2006). Selain itu, pendekatan studi kasus membuat peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai interrelasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus khusus tersebut. (E. Kristi Poerwandari, 2007).